

No	Aktivitas	Kepala Dinas	Sekretaris	Tim Perencanaan	Tim Urusan / Sekretariat	Kepala Dinas	Biro Organisasi	Mutu Baku		
								Persyaratan/ perlengkapan	Durasi	Output
13	Menyampaikan dokumen LKIP kepada Biro Organisasi Setda Prov. Jawa Barat							Dokumen LKIP telah ditandatangani	120 menit	Dokumen LKIP telah ditandatangani
14	Menelaah dan mengevaluasi dokumen LKIP Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat							Dokumen LKIP telah ditandatangani	300 menit	Dokumen LKIP telah dikoreksi
15	Memeriksa draft LKIP Dinas PMPTSP Prov Jawa Barat hasil koreksi Biro Organisasi							Dokumen LKIP telah diperbaiki sesuai koreksi	30 menit	Dokumen LKIP telah diperbaiki sesuai koreksi
16	Mencermati dan menyetujui draft LKIP Dinas PMPTSP Prov Jawa Barat							Dokumen LKIP telah diperbaiki sesuai koreksi	30 menit	Dokumen LKIP telah diperbaiki sesuai koreksi
17	Menyerahkan dokumen LKIP ke Biro Organisasi atau stakeholder terkait, dan mengarsipkan dokumen							Dokumen LKIP telah ditandatangani	300 menit	Arsip Dokumen LKIP



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 52 /SEKRT/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	
Nama SOP	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Adminstrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat4. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi , Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061.1/Kep.201-Org/2020 tentang Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami RPJMD/Renstra Pemerintah Daerah2. Memahami Penyusunan Indikator Kinerja Urama;3. Memahami Penyusunan Pelaporan;
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyusunan Renstra2. SOP Penyusunan LKIP3. SOP Penyusunan LKPJ4. SOP Penyusunan LPPD	Komputer/Printer/Scanner, Jaringan Internet, Alat Komunikasi, ATK, data perencanaan dan pelaporan, dan data kinerja,
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada Akuntabilitas Perangkat Daerah	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali